

**EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Lia Sari

NPM: 1421020149

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Lia Sari

NPM: 1421020149

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M. H.I.

Pembimbing II : Darmayani, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pencabutan dan/atau penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ternyata menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana pasal yang mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Tidak terkecuali dengan Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, dalam hal pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Ngarabatin Kabupaten Way Kanan menurut hukum positif dan bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Ngarabatin Kabupaten Way Kanan menurut *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *coding* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Ngarabatin dalam perspektif hukum positif dikatakan sudah sesuai, di mana Desa Kartajaya Kecamatan Ngarabatin dalam menjalankan urusan pemerintahannya sudah menurut hukum positif, seperti Peraturan Desa Kartajaya Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa Kartajaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. *Kedua*, Eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Ngarabatin dalam perspektif *fiqh siyasah* dikatakan sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari kajian *siyasah dusturiyah* yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya serta hubungan sesama rakyat satu sama lain yang tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Sari
NPM : 1421020149
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH* (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 1 Juni 2020



Lia Sari
Npm. 1421020149



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa
Kartajaya Kecamatan Negerabatin Kabupaten Way Kanan)**

Nama : LIA SARI

NPM : 1421020149

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M. H.I.

NIP. 197409202003121003

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

NIP. 201408091984010118

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi: EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Kartajaya
kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan) disusun oleh LIA SARI,
NPM: 1421020149, Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah
diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M. H.I.

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. an-Nisa (4) : 58).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009).h. 480.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Malik dan Ibundaku Cik'uti, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Lia Sari, dilahirkan di Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan pada tanggal 08 Juli 1997, anak ke sembilan dari Sembilan bersaudara dari pasangan Malik dan Cik'uti.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat SDN 1 Kartajaya lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMPN 2 Negara Batin, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA Gajah Mada Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan).

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Frenki, M. Si. selaku ketua Program Studi Siyasah.
4. H. Rohmat, S.Ag., M. H.I. selaku pembimbing I, dan Dharmayani, S.H.I., M.Sy. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.

6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2020

Lia Sari
NPM. 1421020149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	19
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
5. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
6. Prinsip-Prinsip dalam <i>Siyasah Syar'iyah</i>	32
B. Peraturan Desa dalam Hukum Positif.....	36
C. Tinjauan Pustaka	49
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan	51
1. Sejarah Desa Kartajaya	51
2. Kawasan Geografis Desa Kartajaya	51
3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Desa Kartajaya	55
4. Struktur Organisasi Desa Kartajaya	59
B. Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan	59

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan
Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut Hukum Posisit 68
- B. Eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan
Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut *Fiqh Siyasa* 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Rekomendaasi 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadi penafsiran yang lepas dari pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah : **“EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH* (Studi di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excutence*, dari kata *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sister* yang berarti muncul dan timbul.¹

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²

Hukum positif disebut juga *ius constitum* yang berarti azas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.³

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.

² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7)

³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 56.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang eksistensi atau keberadaan Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan dalam hukum positif dan *fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan dalam memilih judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

Dasar hukum tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga undang-undang tersebut mungkin menganggap kurang penting eksistensi dari peraturan desa. Namun seiring dengan penguatan berbagai aspek tentang desa melalui Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaanya, maka sudah sepatutnya untuk meninjau kembali eksistensi peraturan desa dalam Hirarki Peraturan

⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 35.

Perundang-undangan di Indonesia, terutama di Desa Kartajaya kecamatan
Ngarabatin Kabupaten Way Kanan

2. Secara Subyektif

- a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), di mana dalam disiplin ilmu hukum tatanegara juga mengkaji masalah peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu peraturan desa.
- b. Tersedianya data atau bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya, seperti buku-buku *fiqh siyasah* dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan desa baik Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan struktur pemerintahan asli bagi bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa (*nation state*) ini terbentuk, dengan institusi yang otonom dan memiliki tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri

serta relatif mandiri. Karena itu, sistem hukum yang diterapkan di desa adalah khas, asli Indonesia dan bukan merupakan konsep yang diadopsi dari luar.⁵

Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret atau merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Dengan demikian, Desa merupakan kaki dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam artian, bahwa tidak ada pemerintahan negara republik ini, apabila tidak ada pemerintahan desa, karena pemerintahan desalah yang paling bersentuhan secara langsung dengan rakyat, atau setidaknya secara historis, bangunan pemerintahan desa yang terlebih dahulu bereksistensi daripada pemerintahan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Apalagi, Sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Sisanya sekitar 35% berada di wilayah perkotaan. Saat ini jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 dan pada tahun 2017 ini diperkirakan akan ada penambahan sekitar 200 desa baru.⁶

Mengingat salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun seringkali usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut tidak tercapai terutama bagi masyarakat di pedesaan. Di samping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), h. 492.

⁶ HAW Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dikarenakan perencanaan pembangunan bersifat dari atas ke bawah (*top down planning*), dimana pendekatan tersebut menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (obyek) bukan sebagai pelaku. Maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu aturan dalam rangka mewujudkan hal di atas, yaitu melalui peraturan desa.⁷

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah

⁷ *Ibid.* h. 22.

demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁰

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP

⁸ Slamet Luwihono, "Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa" . *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2013), h. 123-124.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 55

MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.¹¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkan Undang-

¹¹ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencabutan dan/atau penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ternyata menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis mewawancarai bapak Solihun selaku tokoh masyarakat di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan, beliau mengatakan bahwa peraturan desa di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan seperti tidak ada,

dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan peraturan desa tersebut. Padahal di desa-desa lain peraturan desa banyak digunakan untuk mengatur tentang kebersihan, keamanan dan tentang penataan desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap masyarakat atau kurangnya SDM dari perangkat desa untuk merumuskan peraturan desa tersebut sehingga peraturan desa belum sempat dibuat.¹²

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹³

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

¹² Solihun, wawancara dengan penulis, rumah bapak Solihun, Desa Kartajaya kecamatan Ngarabatin Kabupaten Way Kanan, 10 Mei 2020.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, h. 177.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Eksistensi Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah pandangan hukum positif dan *fiqh siyasah* terhadap eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut hukum positif?
2. Bagaimana eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut *fiqh siyasah*?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut *fiqh siyasah*.

¹⁴ H. A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya bermanfaat bagi kepala desa dalam melaksanakan peraturan desa di desa Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan, dan umumnya bagi kepala desa dalam melaksanakan peraturan desa di provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁵ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 3

dan cermat.¹⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari masyarakat Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.578 orang.

¹⁶ *Ibid.* h. 7.

¹⁷ *Ibid.* h. 105.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.¹⁹ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 15 orang yaitu:

- 1) Kepala Desa mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, berjumlah 1 orang.
- 2) Sekertaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam dalam menkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, berjumlah 1 orang.
- 3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sama-sama bertugas membantu sekertaris desa dalam mempersiapkan bahan rapat dan laporan mengenai penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, berjumlah 3 orang.

¹⁹ *Ibid.* h. 81.

- 4) BPD dan tokoh masyarakat sama-sama mempunyai peran yaitu menyalurkan aspirasi rakyat dalam hal penyusunan peraturan desa, berjumlah 5 orang.
- 5) Peneliti mengambil sampel dari masyarakat untuk mengetahui seberapa efektif peraturan desa di desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan dari sudut pandang masyarakat, berjumlah 5 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁰ Observasi dilakukan di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.²¹ Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap aparaturnya desa dan masyarakat di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan.

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 105.

²¹ *Ibid*, h. 97.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.²²

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²³

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 231.

²³ *Ibid.* h. 26.

6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁴

²⁴ *Ibid.* h. 32

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 2004), h. 26.

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan. Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah*

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) h. 22-23.

(peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁴

Sementara menurut Muhammad Iqbal,⁵ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
 - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - 2) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
 - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

3. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

⁵ *Ibid.* h. 15-16.

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁸

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, h. 177.

⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

⁸ *Ibid*, h. 52.

negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁹

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber

⁹ *Ibid*, h. 53.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, h. 178

¹¹ *Ibid*. h. 179.

penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.¹²

4. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Sementara menurut H. A. Djazuli, *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

¹² *Ibid.* h. 178.

¹³ *Ibid.* h. 179.

- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.¹⁴

5. Objek kajian *Siyasah Dusturiyah*

Objek kajian *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli yaitu bahwa permasalahan di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam masyarkatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹⁶ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

¹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, h. 73.

¹⁵ *Ibid.* h. 74.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 154

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Adapun *Siyasah Wadl'iyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu. Menurut Abd. Salam, dalam pandangan Islam, hukum yang dibuat oleh penguasa yang digali dari nilai-nilai budaya yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang disebut *siyasah wadl'iyah* itupun harus diterima, nilainya sama dengan *siyasah syar'iyah*, selama *siyasah wadl'iyah* itu sejalan dan atau tidak bertentangan

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, h. 47

dengan prinsip-prinsip umum syari'at. Karena hal yang demikian ini juga merupakan perintah agama (syariat).¹⁸

Siyâsah wad'iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.¹⁹ Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa: 59).²⁰

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 5.

¹⁹ *Ibid.* h. 6

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha, 2003), h. 378.

umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa dipastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada al-Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum,²¹ dalam hal ini Allah swt menjelaskan dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 57 sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
الْحُكْمَ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الأنعام: ٥٧)

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".(Q.S. al-An'am: 57).²²

- b. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 7

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 490.

yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الْحُجُرَاتُ: ١٣)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarat:13).²⁴

c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*)

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul. Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (*shalih fi kulli az-Zaman wa al-Makan*). Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya.²⁵ dalam hal ini Allah swt menjelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 40 sebagai berikut:

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 8.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 581.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 136.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأحزاب: ٤٠)

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki

di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-

nabi. dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.

al-Ahzab: 40).²⁶

Sedangkan dalil yang melegimitasi bahwa syari'at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 28 dan al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ٢٨)

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia

dijadikan bersifat lemah. (Q.S. an-Nisa: 28).²⁷

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج: ٧٨)

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. al-Hajj: 78).²⁸

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 524.

²⁷ *Ibid.* 249.

²⁸ *Ibid.* h. 397.

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh ada sebuah kolusi dan nepotisme.²⁹ Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, dijelaskan melalui firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. an-Nahl: 90).³⁰

- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut. Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 98.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 456.

kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.³¹

Sementara menurut Yusuf al-Qadhwawi, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur.
- c. Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat.
- f. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- d. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- g. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- h. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- e. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- i. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- j. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.³²

³¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 94.

³² *Ibid.* h. 64

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni :

- a. *Takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. *Wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
- c. *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpengaruh dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.³³

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, Ketuhanan (*Rabbaniyah*), Universal (*Syumul*), Harmonis (*al-Wasthiyyah*), Manusiawi (*Insaniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.

³³ Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 105-106.

6. Prinsip-Prinsip *Siyâsah Syar'iyah*

Berkaitan dengan masalah *siyasah*, Abd. Salam mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya, *siyâsah syar'iyah* yaitu sebagai institusi hukum Islam, dasar pokoknya adalah wahyu atau agama, yaitu nilai dan norma transendental dari Allah yang diyakini kebenaran dan keadilannya sehingga diyakini pula bahwa ia merupakan sumber hukum yang ideal. Oleh karena itu syariat merupakan sumber primer bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber sekundernya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para pakar hukum adat warisan budaya bangsa (doktrin) perlu mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transendental, agar tidak ada hukum adat (doktrin) yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan sebagaimana yang dituangkan dalam syari'at-Nya.³⁴

Prinsip-prinsip dari *Siyâsah Syar'iyah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun

³⁴ M. Muhtarom, "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1, (Mei 2015), h. 26-27

immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.³⁵

Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sepuluh prinsip, adapun prinsip itu sebagai Berikut;

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.³⁶

b. Prinsip Musyawarah.

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 87.

³⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308.

kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.³⁷

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

d. Prinsip Persamaan.

Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa.

e. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna "*ulil amri*". Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintrah bersifat relatif.³⁸

f. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya

³⁷ *Ibid.* h. 308.

³⁸ *Ibid.* h. 309.

yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang handal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya) melalui filter media masa yang bertanggung jawab. Artinya, transparansi atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

g. Prinsip Keadilan.

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan. Pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.³⁹

h. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

i. Prinsip Perdamaian.

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

j. Prinsip Kesejahteraan.

³⁹ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, h. 310.

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan itu merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁴⁰

B. Peraturan Desa dalam Hukum Positif

Persoalan eksistensi (*problem of existence*) merupakan salah satu bahasan dalam filsafat. Persoalan eksistensi (keberadaan) dan hakikat yang ada dikaji secara khusus dalam Ontologi. Dalam ontolog dikaji mengenai eksistensi Tuhan, alam dan manusia. Kajian yang terakhir, yaitu mengenai eksistensi manusia mendapatkan perhatian yang cukup besar terutama sejak munculnya filsafat Socrates. Perlu diketahui, bahwa sebelum munculnya Socrates (Pra Socrates) perhatian para filsuf lebih diarah pada penelitian mengenai eksistensi alam seperti asal usul alam (*arche*). Namun pasca Socrates perhatian filsafat lebih diarahkan pada persoalan manusia. Sebuah ungkapan dari Socrates yang diukir di kuil Delphi, “Kenalilah dirimu”, secara eksplisit menunjukkan perhatian para filsuf terhadap eksistensi manusia. Masalah eksistensi manusia

⁴⁰ *Ibid.* 311-312.

ini secara khusus dikaji juga dalam filsafat manusia atau antropologi filsafat yang biasanya berisi pembahasan sekitar siapa, dari mana dan hendak ke mana manusia itu.⁴¹

Dalam perkembangan filsafat, setelah munculnya agama Kristen perhatian terhadap eksistensi manusia terutama ditunjukkan oleh para filsuf gereja. Santo Augustinus dan Santo Thomas Aquinas adalah dua tokoh filsuf gereja yang berupaya mendamaikan filsafat dan ajaran Kristen khususnya tentang eksistensi manusia. Jadi keberadaan manusia menurut Injil dipahami secara filosofis. Selanjutnya, perhatian para filsuf terhadap eksistensi manusia juga berlanjut pada masa modern dan postmodern sehingga ada berbagai macam pemikiran dan aliran filsafat tentang manusia hingga dewasa ini. Yang tidak dapat dikesampingkan juga pemikiran tentang eksistensi manusia menurut filsafat Islam. Tidak sedikit karya-karya para filsuf Muslim yang membahas tentang eksistensi manusia. Pemikiran tentang eksistensi manusia baik menurut filsafat Barat maupun menurut filsafat Islam yang berguna dalam dunia pendidikan. Cabang filsafat yang secara khusus membahas pendidikan adalah filsafat pendidikan.⁴²

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas

⁴¹ Oyo Hambali dan Siti Asiah, "Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Pendidikan: Studi Komparatif Filsafat Barat Dan Filsafat Islam". *Turats*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2011), h. 41.

⁴² *Ibid.* h. 42.

(ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).⁴³ Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.⁴⁴

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Bendabenda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya. Sementara menurut Ludwig Binswanger analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin.⁴⁵

⁴³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.

⁴⁴ *Ibid.* h. 185.

⁴⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), h. 69.

Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.⁴⁶

Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Manusia dalam dunianya, menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya. Di sinilah peran aktif manusia yang harus menentukan hakikat keberadaan dirinya di dunia ini dan mendorong dirinya untuk selalu beraktifitas sesuai dengan pilihan dirinya dalam mengambil jalan hidup di dunia. Dengan segala peristiwa kesibukannya, maka manusia dapat menemukan arti keberadaannya. Manusia dengan segala aktivitasnya, berani menghadapi tantangan dunia di luar dirinya. Seperti halnya pendapat dari Heidegger tentang *Desain*, bahwa manusia selalu menempatkan dirinya di antara dunia sekitarnya. Yang mana *Desain* terdiri dari dua kata, *da*: di sana dan *sein* : berada, berada disana yaitu di tempat. Manusia selalu berinteraksi dan terlibat dalam alam sekitarnya. Namun, manusia tidak sama dengan dunia sekitarnya, tidak sama dengan benda-benda, dan memiliki keunikan tersendiri, karena manusia sadar akan keberadaan dirinya.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 147.

⁴⁷ Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 55.

Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya, maka ia tak dapat dilepaskan dari dirinya. Manusia harus menemukan diri dalam situasi dan berhadapan dengan berbagai kemungkinan atau alternative yang dia punyai. Bagi Jasper dan Hiedegger, situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut. Manusia itu terbuka bagi dunianya. Kemampuan untuk berinteraksi dengan hal-hal diluar dirinya karena memiliki seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Dengan mengerti dan memahami itulah manusia beserta kesadarannya akan berpotensi di antara benda-benda lainya, harus berbuat sesuatu untuk mengaktualisasikan potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya dan memberi manfaat pada dunianya dengan berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinannya.⁴⁸

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensial dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan. Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada.⁴⁹ Konsep ada dalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia dilemparkan ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan

⁴⁸ *Ibid.* h. 56

⁴⁹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 364.

adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yang bertugas untuk mengadakan dirinya.⁵⁰

Ada dalam yang digunakan oleh Heidegger, mengandung arti yang dinamis. Yakni mengacu pada hadirnya subjek yang selalu berproses. Begitu juga dunia yang dihadirkan oleh Heidegger merupakan dunia yang dinamis, hadir dan menampilkan diri, bukan dunia tertutup, terbatas dan membatasi manusia. Jadi, ada dalam dunia itu tidak menunjuk pada beradanya manusia di dalam dunia seperti berada karung atau baju dalam almari, melainkan mewujudkan dalam realitas dasar bahwa manusia hidup dan mengungkapkan keberadaannya di dunia sambil merancang, mengola, atau membangun dunianya.⁵¹

Persoalan tentang berada ini hanya dapat dijawab melalui ontologi, dalam artian; jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia dan dicari artinya dalam hubungan tersebut. Satu-satunya berada, yang dapat dimengerti sebagai “berada” adalah “beradanya” manusia. Perbedaan antara “berada” (*Sein*) dan “yang berada” (*Seiende*). Istilah “yang berada” (*Seiende*) hanya berlaku bagi benda-benda, yang bukan manusia, jika di pandang pada dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, hanya berdiri sendiri.⁵²

Sehingga manusia memang harus keluar dari dirinya sendiridan berada di antara atau di tengah-tengah segala “yang berada”, untuk mencapai eksistensinya. Ajaran eksistensialisme sangat beragam, tidak hanya satu. Dari beberapa penjelasan di atas belum sepenuhnya kita dapat memahami definisi eksistensialisme yang universal, karena pemikiran para filsuf mengenai

⁵⁰ Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 155.

⁵¹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat*, h. 218-220

⁵² Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat*, h. 150.

eksistensialisme memiliki latar belakang yang beragam. Sebenarnya, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang bersifat teknis, yang tergambar dalam berbagai sistem, yang berbeda satu sama lain. Namun, ada beberapa substansi atau hal yang sama diantaranya sehingga bisa dikatakan sebagai filsafat eksistensialisme. Substansi-substansi tersebut adalah:⁵³

1. Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusialah yang bereksistensi. eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik.
2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya semula.
3. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia.
4. Filsafat eksistensialisme memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman ini berbeda-beda antara satu filosof dengan filosof yang lainnya. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Marchel kepada pengalaman

⁵³ *Ibid.* h. 151.

keagamaan dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, kesalahan, dan lain sebagainya.

Untuk menerangkan eksistensialisme dengan mengambil ide-ide utama dari tulisan-tulisan para tokoh, akan mendatangkan kebingungan, karena setiap penulis ini mempunyai pikiran tersendiri tentang apa yang mereka maksud dengan ide “eksistensialisme”. Namun, pada initinya eksistensialisme diawal Kierkegaard ke belakang, sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, adalah “sebuah gerakan pemberontakan selama lebih dari seratus tahun terhadap dehumanisasi manusia dalam masyarakat industri”.⁵⁴

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁵⁵ Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.⁵⁶

Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Peraturan desa.

⁵⁴ Erich From, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Terj. Agung Prihantono (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004), h. 61.

⁵⁵ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7)

⁵⁶ Slamet Luwihono, “Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa” . *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2013), h. 123-124.

Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁸

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵⁹

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

⁵⁷ *Ibid.* h. 124.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 55

Nomor Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.⁶⁰

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan Peraturan Desa wajib

⁶⁰ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7

dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.⁶¹

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.⁶²

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan Presiden.
7. Peraturan Daerah Provinsi, dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶³

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

⁶¹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 69.

⁶² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 70

⁶³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8

3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian yang membahas tentang Peraturan Desa antara lain:

Pertama: Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), diteliti oleh Prayoza Saputra pada tahun 2018 di Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan ahwasanya proses Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya, berdasarkan pasal 1 ayat (1) bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang pada dasarnya dimulai dari

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan Proses yang BPD lakukan dalam penyusunan dan pembentukan peraturan desa di Desa Tridayasakti yaitu dengan melakukan rapat bersama pemerintah desa untuk merancang peraturan desa tanpa melaksanakan kunjungan kemasyarakatan, bertatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama beserta perangkat desa untuk menampung aspirasi yang diberikan oleh masyarakat desa Tridayasakti, dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.⁶⁶

Kedua, skripsi tentang Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diteliti oleh M Ichsan Rouyas Sitorus pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 Juncto Pasal 137 UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur, juga harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 138 UU Nomor 23 Tahun 2014. Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Desa. Pengemban

⁶⁶ Prayoz Saputra. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)". (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Desa tersebut.⁶⁷

Maka dengan demikian dari dua skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang eksistensi peraturan daerah seperti yang saya teliti ini, dimana Prayozza Saputra membahas tentang Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), dan M Ichsan Rouyas Sitorus membahas tentang kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang Eksistensi Peraturan Desa dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan).

⁶⁷ M Ichsan Rouyas Sitorus. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha, 2003.

Buku-buku

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Ali Maksum, *Pengantar Filsafat* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta, Bulan Bintang: 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Erich From, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Terj. Agung Prihantono Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

H. A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2003.

Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* Jakarta: Sinar harapan, 2003.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung; Mandar Maju, 2006.

- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre* Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2002.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)* Yogyakarta: FH-UII Press, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 55
- Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta, Bulan: 2004.
- Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

- M. Muhtarom, “Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H”. *Suhuf*, Vol. 27, No. 1, (Mei 2015).
- Oyo Hambali dan Siti Asiah, “Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Pendidikan: Studi Komparatif Filsafat Barat Dan Filsafat Islam”. *Turats*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2011).
- Slamet Luwihono, “Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa” . *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2013).

Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.